

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO KABUPATEN JOMBANG

Jl. Darmo Sugondo no. 83 - Jombang, Jawa Timur | 61453



rsudploso@yahoo.co.id



0321 - 887888 (LINE / FAX)

"Senyummu Kebahagiaanku"

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) RSUD Ploso Kabupaten Jombang Tahun 2024 telah terselesaikan. Renja tahun 2024 ini disusun atas dasar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024.

Renja 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan RSUD Ploso Kabupaten Jombang dalam waktu setahun mendatang. Penyusunan Renja Tahun 2024 ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) RSUD Ploso Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 yang dalam penyusunannya melibatkan seluruh pihak terkait di lingkungan RSUD Ploso, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Rencana Kerja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi rumah sakit dalam menyesuaikan perubahan Rencana Kerja serta Rencana Kegiatan dan Anggaran organisasi khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan *stakeholder* RSUD Ploso Kabupaten Jombang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian Renja Tahun 2024 ini. Semoga dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar untuk tercapainya tujuan bersama.

Jombang, 12 Juli 2023
Plt. DIREKTUR RSUD PLOSO
KABUPATEN JOMBANG

dr. Hendri Marzuki
Penata Tk. I
NIP. 19701031 201412 1 001

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	6
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	29
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	34
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	43
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	47
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	47
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	48
	3.3 Program dan Kegiatan	48
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	53
BAB V	PENUTUP	54
	5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja	54
	5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	54
	5.3 Rencana Tindak Lanjut	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.4	PETA PROSES BISNIS RSUD PLOSO TAHUN 2024-2026	38
------------	---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	7
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayan Perangkat Daerah	22
Tabel 2.3.1	Pemetaan Permasalahan	29
Tabel 2.3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan RSUD Ploso Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	31
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2024	40
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 RSUD Ploso Kabupaten Jombang	50

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang - Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Mendasar pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah kali ini sedikit berbeda dengan periode sebelumnya. Rencana kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ploso tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis RSUD Ploso Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026, yang merupakan terjemahan dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Selanjutnya, Rencana Kerja Tahun 2024 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahun 2024 dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Tahapan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan meliputi :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) RSUD Ploso Tahun 2024 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 – 2026. Renja ini juga merupakan salah satu dokumen perencanaan yang menjadi acuan sekaligus hasil kesepakatan lanjutan bagi seluruh komponen RSUD Ploso dalam menjalankan kebijakan, program, dan kegiatan tahun 2024. Rancangan akhir Rencana Kerja 2024 mengacu pada rancangan akhir RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2024 yang merupakan akumulasi dari seluruh Renja OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang dan sebagai hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Jombang sekaligus bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Jombang Tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut, maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 merupakan tahapan mekanisme perencanaan yang sangat penting untuk dilaksanakan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- l. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

- Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 - o. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ploso (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5D);
 - p. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026;
 - q. Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ploso;
 - r. Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 - s. Surat Edaran Bupati Jombang Nomor: : 050/10347/415.01/2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari disusunnya Renja RSUD Ploso Kabupaten Jombang Tahun 2024 adalah:

- 1) Sebagai kerangka mikro perencanaan jangka pendek (1 tahunan).
- 2) Sebagai arah dalam pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ploso Kabupaten Jombang menjadi rumah sakit rujukan terbaik dan terjangkau oleh masyarakat dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun.
- 3) Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.

b. Tujuan

Tujuan dari disusunnya Renja adalah sebagai dokumen perencanaan PD jangka pendek yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program kegiatan pada RSUD Ploso Kabupaten Jombang satu tahun kedepan yakni tahun 2024, sehingga pelaksanaannya terarah dan tepat sasaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja RSUD Ploso Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Pada bab ini akan dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya akan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Agar lebih jelas akan ditampilkan dalam tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan sebagai berikut:

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sd tahun n-3 (Tahun 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (Tahun 2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n -1 (2023))	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n- 2 (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (2023)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase capaian pemenuhan sarana prasarana, alat kesehatan, obat esensial/ BMHP esensial dan SDM penunjang layanan rujukan	N/A N/A	80,92 %	88 %	83,80 %	95,28 %	90 %	82,11 %	91,23 %
		Persentase capaian pemenuhan sarana prasarana, alat kesehatan dan SDM penunjang layanan rujukan	84 %	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A
		Persentase capaian SPM RS	82,98 %	79,79 %	87 %	80,85 %	92,93 %	88 %	85,11 %	96,72 %
		Persentase NDR (kematian > 48 jam)	N/A N/A	106 %	100 %	158,72 %	158,72 %	100 %	150,56 %	150,56 %
	Kegiatan : Penyediaan	Nilai ASPAK unsur sarana	93 %	91,84 %	90 %	100,00 %	111,11 %	95 %	100 %	105,26 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sd tahun n-3 (Tahun 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (Tahun 2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2023))	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (2023)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
	Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan	Nilai ASPAK unsur prasarana	86 %	85,37 %	90 %	81,40 %	90,44 %	95 %	81,40 %	85,68 %
		Nilai ASPAK unsur alat kesehatan	51 %	50,81 %	60 %	48,7 %	81,17 %	65 %	49,35 %	75,92 %
	Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan obat esensial/ BMHP esensial di Instalasi Farmasi	N/A N/A	84 %	100 %	93 %	93 %	100 %	98,98 %	98,98 %
		Persentase pemenuhan SDM sesuai standar RS	N/A N/A	92,57 %	95 %	95,92 %	100,97 %	100 %	80,82 %	80,82 %
	Sub Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Persentase pembangunan gedung yang terlaksana	N/A N/A	100 %	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A 100 %	N/A N/A	N/A N/A
	Sub Kegiatan : Pengembangan Rumah Sakit	Persentase kebutuhan sarana prasarana pengembangan rumah sakit yang terpenuhi	N/A N/A	100 %	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A
	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pembangunan gedung yang terlaksana	N/A N/A	100 %	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sd tahun n-3 (Tahun 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (Tahun 2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2023))	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (2023)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
	Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik, Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase kebutuhan alat kesehatan/ penunjang medik, fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit yang terealisasi	3 unit/ set	99,39 %	95 %	100 %	105,26 %	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A
		Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	36 unit / set	36 unit / set
	Sub Kegiatan : Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase obat-obatan yang terealisasi	N/A N/A	59,58 %	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A
	Sub Kegiatan : Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase kebutuhan BMHP yang terealisasi	N/A N/A	79,13 %	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Persentase pembangunan gedung yang terlaksana	N/A N/A	N/A	100	100 %	100 %	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sd tahun n-3 (Tahun 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (Tahun 2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2023))	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (2023)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
	Rumah Sakit	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	1 unit	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	1 unit	1 unit	100 %
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase SPM dilingkup Yanmed dan Keperawatan yang tercapai	85,53 %	81,79 %	85 %	82,96 %	98 %	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A
		2. Persentase SPM dilingkup Tata usaha yang tercapai	76,92 %	75 %	75 %	75 %	100 %	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A
		3. Persentase SPM dilingkup Perencanaan dan rekam medis yang tercapai	60 %	60 %	80 %	60 %	75 %	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A
		4. Persentase pemenuhan SDM sesuai standar rumah sakit	100 %	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A
		1. Persentase dokumen operasional pelayanan rumah sakit yang tersedia tepat waktu	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	100 %	100 %	100 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sd tahun n-3 (Tahun 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (Tahun 2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2023))	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (2023)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
		dilingkup Yanmed dan Keperawatan								
		2. Persentase dokumen operasional pelayanan rumah sakit yang tersedia tepat waktu dilingkup Tata Usaha	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	100 %	100 %	100 %
		3. Persentase dokumen operasional pelayanan rumah sakit yang tersedia tepat waktu dilingkup Perencanaan dan Rekam Medis	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	100 %	100 %	100 %
	Sub Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase pasien penyakit menular dan tidak menular yang dilayani sesuai standar	N/A N/A	100 %	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A
	Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah SPM dilingkup Yanmed dan Keperawatan yang tercapai	N/A	66	70	67	95,71 %	N/A	N/A	N/A N/A

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sd tahun n-3 (Tahun 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (Tahun 2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2023))	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (2023)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
		Jumlah SPM dilingkup Tata Usaha yang tercapai	N/A	6	6	6	100 %	N/A	N/A	N/A N/A
		Jumlah SPM dilingkup Perencanaan dan Rekam Medis yang tercapai	N/A	3	5	3	75 %	N/A	N/A	N/A N/A
		Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	57 dok	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	6 dok	6 dok	100 %
		Persentase pemenuhan SDM sesuai standar RS	100 %	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A
	2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja pegawai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan tunjangan ASN RSUD Ploso yang dibayarkan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100 %	100 %	115 orang	112 orang	97 %	115 orang	107 orang	93,04 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sd tahun n-3 (Tahun 2021)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (Tahun 2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2023))	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (2023)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*					
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja pegawai	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah orang yang menerima pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	N/A	N/A	N/A	N/A	89 orang	89 orang	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target, melebihi target dan kurang dari target. Berikut ini akan dilakukan pembahasan dari masing-masing capaian program dan kegiatan tersebut beserta faktor-faktor penyebabnya dan tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini memiliki indikator kinerja:

1. Persentase capaian pemenuhan sarana prasarana, alat kesehatan, obat esensial/ BMHP esensial dan SDM penunjang layanan rujukan.

Pada tahun 2023 indikator ini memiliki target 90%, realisasinya 82,11% sehingga capaiannya sebesar 91,23%. Realisasi indikator ini belum sesuai target karena nilai ASPAK unsur alat kesehatan dan persentase ketersediaan obat esensial/ BMHP esensial di Instalasi Farmasi belum memenuhi target. Hal ini disebabkan karena masih banyak alat kesehatan yang menurut standar harus dimiliki rumah sakit kelas D, belum dapat dipenuhi oleh RSUD Ploso. Penyebabnya antara lain, gedung-gedung lama belum sepenuhnya didukung dengan prasarana yang memadai, seperti hydrant system. Kapasitas genset (254 KVA) yang dimiliki masih kurang untuk dapat mengampu seluruh listrik saat ini (kapasitas listrik 555 KVA). Ditambah dengan anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan BLUD yang terbatas untuk membiayai kebutuhan RSUD Ploso. Pada tahun 2023, RSUD Ploso mengajukan usulan untuk pemenuhan genset dan *hydrant system* melalui DAK tahun 2024. Namun hasil akhir proses sinkronisasi dan harmonisasi, usulan tersebut tidak disetujui oleh Kemenkes. Sementara itu, ketersediaan obat dan BMHP esensial di Instalasi Farmasi belum memenuhi target karena adanya dokter spesialis baru sehingga obat yang dibutuhkan, belum masuk ke formularium rumah sakit. Obat dan BMHP yang telah dipesan via e-katalog, terlambat datang atau stok kosong di distributor sehingga harus PO pabrik. Ditambah proses pembayaran yang terlambat karena *cash flow* RSUD Ploso tidak terlalu baik sehingga kondisi terkunci/ *nge-lock* untuk dapat memesan obat lagi dari distributoryang sama. Kasus yang terjadi pada tahun 2023 tidak sesuai dengan perencanaan yang dilakukan pada tahun sebelumnya juga turut andil menjadi penyebab tidak memenuhi target.

2. Persentase capaian SPM RS.

Pada tahun 2023 indikator ini memiliki target 88%, realisasinya 85,11% sehingga capaiannya sebesar 96,72%. Realisasi indikator ini belum sesuai target karena ada beberapa indikator SPM yang belum memenuhi target SPM RSUD Ploso. SPM di lingkup pelayanan medis dan keperawatan yang belum memenuhi standar yaitu :

a) Pelayanan Rawat Jalan

- Kepuasan pelanggan pada rawat jalan

Kepuasan pelanggan rawat jalan pada tahun 2023 sebesar 82,79%, lebih rendah dibandingkan target $\geq 90\%$. Hasil analisis yang dilakukan menemukan beberapa penyebabnya, antara lain :

1. Pasien datang bersamaan sehingga terjadi penumpukan antrian untuk mendapatkan pelayanan pendaftaran. Akibatnya waktu tunggu di loket pendaftaran tergolong lama.
2. Waktu tunggu yang lama untuk mendapatkan pelayanan di poli spesialis karena dokter spesialis datang tidak sesuai jadwal di HFIS (aplikasi yang harus dipergunakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS).
3. Waktu tunggu untuk mendapatkan pelayanan farmasi juga tergolong lama. Namun saat ini telah ada pelayanan antar obat gratis bagi pasien yang mendapatkan obat kronis. Hanya saja belum semua wilayah dapat terlayani dengan inovasi SITAROBMANIS (Sistem Antar Obat Aman dan Gratis).

- Penegakan diagnosis melalui pemeriksaan mikroskopi tuberkulosis
Penegakan diagnosis saat ini sudah tidak menggunakan mikroskopi. Namun kini menggunakan TCM dan Gen expert. Mikroskopi digunakan untuk *follow-up* atau pemeriksaan ulang TB paru (akhir fase intensif bulan ke-2, bulan ke-5 dan akhir pengobatan). TB ekstra paru tidak ada *follow-up* atau pemeriksaan ulang. Sehingga perlu adanya perubahan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Ploso yang menyesuaikan dengan ketentuan yang terbaru terkait dengan penegakan diagnosis TB.

b) Instalasi Gawat Darurat

- Kematian pasien < 24 jam di IGD

Angka kematian pasien < 24 jam di IGD pada tahun 2023 sebesar 5,23‰, lebih tinggi dibandingkan target $\leq 2\%$ umumnya

dikarenakan beberapa kondisi, yaitu :

1. Pasien datang ke IGD sudah dalam kondisi kritis dan tidak respon dengan tindakan/pengobatan *life saving*.
2. Pasien kritis yang memerlukan rujukan terlambat dirujuk karena rumah sakit rujukan banyak yg penuh sehingga meninggal di IGD.
3. Beberapa kasus kematian mendadak pada pasien stabil, di luar perkiraan. Umumnya karena keluarga tidak/terlambat melaporkan perubahan kondisi kepada petugas.

c) Pelayanan Rawat Inap

- Kematian pasien > 48 jam

Jumlah kematian > 48 jam melebihi target < 0,24% karena beberapa penyebab yaitu :

1. Komplikasi penyakit yang diderita oleh pasien
2. Keluarga pasien/ pasien tidak mau dirujuk
3. Komplikasi penyakit pasien yang diderita sehingga mempercepat kematian

Sehingga perlu mengoptimalkan pemanfaatan ruang ICU sehingga pasien dengan pengawasan ketat bisa diobservasi di ICU. Namun di sisi lain akan terjadi pembengkakan biaya. Sehingga perlu kebijakan manajemen untuk mengatur terkait hal tersebut.

- Kepuasan pelanggan

Kepuasan pelanggan rawat inap pada tahun 2023 sebesar 82,13%, lebih rendah dibandingkan target $\geq 90\%$. Hasil analisis yang dilakukan menemukan beberapa penyebabnya, antara lain :

1. Penampilan dan komunikasi petugas perlu ditingkatkan dalam memberikan pelayanan serta mengedukasi pasien dan keluarganya.
2. Prasarana kamar rawat inap yang sering menjadi keluhan pasien dan keluarganya seperti pendingin ruangan/ AC dan air.
3. Kurangnya kebersihan kamar rawat inap sehingga perlu mem-*push* kinerja penyedia jasa kebersihan.

d) Pelayanan Persalinan

- Pelayanan persalinan melalui SC

Pelayanan persalinan melalui SC pada tahun 2023 sebesar 45%, melebihi target SPM sebesar $\leq 20\%$. Hal ini dikarenakan RSUD Ploso merupakan fasilitas kesehatan rujukan sehingga menjadi tempat

rujukan ibu-ibu yang akan bersalin dengan penyulit, dengan kemungkinan besar harus melalui operasi SC (*sectio caesaria*). Sementara sebagian besar ibu-ibu hamil yang akan bersalin secara normal/ pervaginam dapat dilayani di fasilitas kesehatan primer (puskesmas, klinik, praktek mandiri bidan, dll).

e) Pelayanan Intensif

- Pemberi pelayanan intensif

Ada 12 perawat yang bertugas di ICU. Ada 11 perawat yang telah mengikuti pelatihan, dengan rincian :

- Pelatihan dasar ICU : 7 orang
- Pelatihan ventilator : 2 orang
- Workshop ventilator : 2 orang

Saat ini telah mengusulkan pelatihan dasar ICU bagi satu perawat ICU dan pelatihan lanjutan ICU bagi perawat ICU yang lain ke Unit Diklat.

SPM di lingkup perencanaan dan rekam medis yang belum memenuhi standar, yaitu :

a) Kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam setelah selesai pelayanan

Hal ini disebabkan oleh :

1. Tanggal kembali berkas rekam medis lebih dari 1x24 setelah pasien pulang.
2. Kelengkapan pengisian rekam medis masih banyak yang belum diisi oleh PPA (Profesional Pemberi Asuhan).
3. Pengisian yang sering belum diisi, antara lain diagnosa pasien utama, tanda tangan dokter, tanggal dan jam visite.

b) Kelengkapan *informed consent* setelah mendapatkan informasi

Hal ini disebabkan petugas tidak tertib dalam mengisi form *informed consent*, antara lain nama tindakan yang dilakukan, tanda tangan dokter, jam dan tanggal pengisian *informed consent*.

Rencana tindak lanjutnya adalah segera menerapkan Rekam Medis Elektronik di rawat inap sehingga dapat meminimalisir ketidaklengkapan pengisian rekam medis pasien.

Sedangkan SPM di lingkup tata usaha yang belum memenuhi standar, yaitu :

a) Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat

Ada beberapa penyebab kenaikan pangkat pegawai tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain :

1. Adanya aturan baru e-rekom dari Kemenkes untuk ukom bagi kenaikan pangkat untuk golongan tertentu. Sehingga menyebabkan waktu kenaikan mundur.
2. Pada tribulan 4 tidak ada pengajuan karena salah satu persyaratan yaitu PAK Integrasi belum diterbitkan oleh Dinas Kesehatan sehingga Tim Penilai RSUD Ploso tidak dapat menerbitkan PAK Konversi sebagai salah satu persyaratan kenaikan pangkat.

b) Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun

Target tidak tercapai (3,84% dari target $\geq 80\%$) dikarenakan terbatasnya ketersediaan anggaran untuk mengirim pegawai mengikuti pelatihan eksternal. Ditambah dengan pelatihan eksternal yang diikuti oleh pegawai tidak semuanya memiliki 20 JP sehingga tak cukup hanya sekali mengikuti pelatihan yang dibutuhkan.

c) *Cost Recovery*

Cost recovery RSUD Ploso sebesar 12,3%, masih jauh dari target sebesar $\geq 40\%$. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut, pendapatan tahun 2023 sebanyak 39.054.838.681,97, sedangkan pengeluaran operasional dalam satu tahun sejumlah 34.126.599.669,10. Sehingga kondisi keuangan RSUD Ploso belum terlalu baik. Faktanya adalah jumlah pasien meningkat pada tahun 2023, namun dikarenakan RSUD Ploso masih tipe D sehingga klaim INA CBG's masih rendah. Di samping itu perlu dilakukan efisiensi di semua lini.

d) Ketepatan waktu pemberian jasa pelayanan (intensif)

Pada tahun 2023 sering terjadi keterlambatan pembayaran jasa pelayanan. Dari target $< 0,24\%$, belum dapat dipenuhi karena realisasi sebesar 25%. Hal ini disebabkan karena :

1. Adanya perubahan cara perhitungan japel BPJS yang awalnya global menjadi perunit layanan pada SPJ japel tribulan 1 sehingga realisasi jasa pelayanan melebihi tanggal 20.
2. Perubahan SIMRS baru sehingga ada masa transisi penyesuaian perhitungan jasa pelayanan.

Diharapkan SIMRS yang baru dapat mengakomodir perhitungan jasa

pelayanan melalui sistem sehingga lebih cepat dan dapat memuaskan pelanggan internal rumah sakit.

- e) Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi

Realisasi pada tahun 2023 sebesar 91%, belum dapat memenuhi target sebesar 100%. Penyebabnya adalah kalibrasi belum terlaksana secara menyeluruh dikarenakan terbagi menjadi 2 tahap. Tahap kedua rencananya akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023, namun karena keterbatasan anggaran sehingga jadwal kalibrasi mundur dan akan dilaksanakan pada tahun 2024.

- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat ini memiliki dua kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota

Kegiatan ini memiliki indikator kinerja :

- a) Nilai ASPAK unsur sarana

yaitu nilai unsur sarana yang tercantum di aplikasi ASPAK milik Kemenkes. Pada tahun 2023, target yang harus dicapai sebesar 95% dan realisasinya sebesar 100%, maka capaian realisasinya sebesar 105,26%. Secara garis besar, sarana yang dimiliki oleh RSUD Ploso telah sesuai dengan Permenkes Nomor 3 Tahun 2020, namun untuk kualitas sarana tersebut, perlu dilakukan pemenuhan terhadap standar yang ada. Pemenuhan tersebut dilakukan secara bertahap, sesuai dengan ketersediaan anggaran, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

- b) Nilai ASPAK unsur prasarana

yaitu nilai unsur prasarana yang tercantum di aplikasi ASPAK milik Kemenkes. Pada tahun 2023, target yang harus dicapai sebesar 95% dan realisasinya sebesar 81,40%, maka capaian realisasinya sebesar 85,68%. Prasarana yang dimiliki oleh RSUD Ploso tiap tahun bertambah seiring bertambahnya gedung pelayanan. Namun demikian, belum semua gedung yang ada memiliki prasarana yang dibutuhkan karena keterbatasan anggaran BLUD.

- c) Nilai ASPAK unsur alat kesehatan

yaitu nilai unsur alat kesehatan yang tercantum di aplikasi ASPAK milik Kemenkes. Pada tahun 2023, target yang harus dicapai sebesar 65%

dan realisasinya sebesar 49,19%, maka capaian realisasinya sebesar 75,42%. Alat kesehatan yang seharusnya dimiliki RSUD Ploso sesuai standar rumah sakit tipe D. Namun karena ketersediaan anggaran yang terbatas sehingga masih banyak alat kesehatan yang belum dimiliki seiring dengan bertambahnya jumlah pelayanan spesialisasi di RSUD Ploso.

d) Persentase ketersediaan obat esensial/ BMHP esensial di Instalasi Farmasi

Pada tahun 2023, target yang harus dicapai sebesar 100% dan realisasinya sebesar 97,96%, maka capaian realisasinya sebesar 97,96%. Anggaran untuk pengadaan obat dan BMHP esensial tersedia, namun obat yang digunakan *user* belum masuk ke formularium rumah sakit. Adanya dokter spesialis baru yang memberikan pelayanan di RSUD Ploso menjadi salah satu penyebabnya. Pesanan barang terlambat datang atau bahkan stok kosong di distributor menyebabkan ketersediaan obat atau BMHP esensial tidak terpenuhi. Ditambah proses pembayaran yang terlambat karena *cash flow* RSUD Ploso tidak terlalu baik sehingga kondisi terkunci/ *nge-lock* untuk dapat memesan obat lagi dari distributor yang sama. Kasus yang terjadi pada tahun 2023 tidak sesuai dengan perencanaan yang dilakukan pada tahun sebelumnya juga turut andil menjadi penyebab tidak memenuhi target

e) Persentase pemenuhan SDM sesuai standar RS

Pada tahun 2023, target yang harus dicapai sebesar 100% dan realisasinya sebesar 80,82%, maka capaian realisasinya sebesar 80,82%. Semakin bertambahnya gedung pelayanan serta berkembang dan bervariasi jenis pelayanan di RSUD Ploso, mengakibatkan bertambahnya kebutuhan jumlah dan jenis SDM sesuai dengan Analisis Beban Kerja tahun 2023.

Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota ini memiliki dua sub kegiatan, yaitu :

a) Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik, Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Indikator kinerja : Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan

Pengadaan alat kesehatan sudah terealisasi dengan capaian 100% dengan jumlah 36 unit.

b) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

Indikator kinerja : Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit. Pembangunan gedung PONEK lantai 4 dan 5 telah selesai dibangun.

2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini memiliki indikator kinerja :

a) Persentase dokumen operasional pelayanan rumah sakit yang tersedia tepat waktu dilingkup Yanmed dan Keperawatan.

Pada tahun 2023, target yang harus dicapai sebesar 100% dan realisasinya sebesar 100%, maka capaian realisasinya sebesar 100%.

b) Persentase dokumen operasional pelayanan rumah sakit yang tersedia tepat waktu dilingkup Tata Usaha.

Pada tahun 2023, target yang harus dicapai sebesar 100% dan realisasinya sebesar 100%, maka capaian realisasinya sebesar 100%.

c) Persentase dokumen operasional pelayanan rumah sakit yang tersedia tepat waktu dilingkup Perencanaan dan Rekam Medis.

Pada tahun 2023, target yang harus dicapai sebesar 100% dan realisasinya sebesar 100%, maka capaian realisasinya sebesar 100%.

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ini memiliki satu sub kegiatan, yaitu Operasional Pelayanan Rumah Sakit. Indikator kinerjanya adalah jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit. Target indikator ini sebanyak 6 dokumen, dan sampai dengan akhir tahun 2023 telah tercapai 6 dokumen yang telah disusun.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan PD dapat dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM dan IKK. Berikut ini akan disajikan data pencapaian kinerja pelayanan RSUD Ploso sampai dengan tahun 2023.

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH RSUD PLOSO
KABUPATEN JOMBANG

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indikator Tujuan PD											
	1. Indeks kualitas pelayanan RSUD Ploso			7,50	8,00	N/A	N/A	6,40	8,49	N/A	N/A	Indikator tujuan pada tahun 2024 berubah
	2. Indeks Reformasi Birokrasi RSUD Ploso			N/A	N/A	71	76	38,79	71,08	71	76	RSUD Ploso berproses berbenah di semua lini dalam kaitannya dengan penerapan reformasi birokrasi
	3. Indeks Kesehatan			0,8102	0,8123	0,8142	0,8161	0,8130	0,837	0,8142	0,8161	
2	Indikator Sasaran PD											
	1. Nilai evaluasi AKIP RSUD Ploso	√		82	83	80,50	81	80,10	81,06	80,50	81	Tingkat capaian belum bisa 100% karena evaluasi atas pelaporan kinerja dengan nilai 17,47 dari bobot 25% atau capaian 69,88% (CC)

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
												yang berarti bahwa pemenuhan kualitas kriteria sebagian besar (>50% - 75%) telah terpenuhi, namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1) Evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan oleh SDM yang memadai karena belum seluruh tim evaluasi internal mendapatkan bimbingan teknis terkait evaluasi SAKIP sehingga penilaian internal belum dilakukan dengan

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
												pendalaman yang memadai, 2) Hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
	2. Persentase elemen penilaian yang memenuhi standar akreditasi			75%	100%	N/A	N/A	81,25%	100%	N/A	N/A	
	3. Indeks Kepuasan Masyarakat	√		86	88	N/A	N/A	78,25	83,36	N/A	N/A	Tingkat capaian belum bisa 100% karena hasil evaluasi atas penilaian, masih ada 4 unsur layanan yang berada di bawah nilai IKM RS, yaitu a. Waktu b. Produk spesifikasi pelayanan c. Sarana prasarana d. Penanganan

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
												pengaduan
	4 Indeks Pelayanan Publik			3,75	4,00	N/A	N/A	2,49	4,32	N/A	N/A	
	5. NDR (angka kematian > 48 jam)			≤ 25 ‰	≤ 25 ‰	≤ 25 ‰	≤ 25 ‰	23,40‰	12,36‰	≤ 25 ‰	≤ 25 ‰	
	6. Persentase capaian Indikator Nasional Mutu rumah sakit			N/A	N/A	75%	80%	N/A	N/A	75%	80%	
3.	Indikator Program :											
	1. Persentase capaian pemenuhan sarana prasarana, alat kesehatan, obat esensial/ BMHP esensial dan SDM penunjang layanan rujukan			88%	90%	N/A	N/A	83,80%	82,11%	N/A	N/A	Pada tahun 2024, indikator ini masih ada dengan redaksi yang berbeda
	2. Persentase capaian SPM RS			87%	88%	82,98%	87,23%	80,85%	85,11%	82,98%	87,23%	
	3. Persentase capaian pemenuhan sarana prasarana, alat kesehatan, dan SDM penunjang layanan rujukan			N/A	N/A	84%	85%	N/A	N/A	84%	85%	
4	Indikator Kegiatan :											
	1. Nilai ASPAK unsur sarana			90%	95%	93%	94%	100%	100%	100%	100%	Realisasi capaian tahun 2022 sebesar 100%, sesuai dengan hasil input di ASPAK Kemenkes
	2. Nilai ASPAK unsur prasarana			90%	95%	86%	87%	81,40%	81,40%	86%	87%	

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	3. Nilai ASPAK unsur alat kesehatan			60%	65%	51%	52%	48,7%	49,35%	51%	52%	
	4. Persentase ketersediaan obat esensial/ BMHP esensial di Instalasi Farmasi			100%	100%	N/A	N/A	93%	98,98%	N/A	N/A	
	5. Persentase pemenuhan SDM sesuai standar RS			95%	100%	N/A	N/A	95,92%	80,82%	N/A	N/A	Pada tahun 2024, indikator ini menjadi indikator kegiatan yang lain
5	Indikator Sub Kegiatan :											
	1. Persentase kebutuhan alat kesehatan/penunjang medik, fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit yang terealisasi			95%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	
	2. Persentase pembangunan gedung yang terlaksana			100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	
	3. Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit			N/A	1 unit	1 unit	1 unit	N/A	1 unit	1 unit	1 unit	
	4. Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan			N/A	3 unit/set	3 unit/set	3 unit/set	N/A	36 unit/set	3 unit/set	3 unit/set	
6	Indikator Kegiatan :											
	1. Persentase SPM dilingkup Yanmed dan Keperawatan yang tercapai			85%	N/A	85,53%	88,16%	82,96%	N/A	85,53%	88,16%	

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	2. Persentase SPM dilingkup Tata usaha yang tercapai			75%	N/A	84,62%	92,31%	75%	N/A	84,62%	92,31%	
	3. Persentase SPM dilingkup Perencanaan dan rekam medis yang tercapai			80%	N/A	80%	100%	60%	N/A	80%	100%	
	4. Persentase dokumen operasional pelayanan rumah sakit yang tersedia tepat waktu dilingkup Yanmed dan Keperawatan			N/A	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
	5. Persentase dokumen operasional pelayanan rumah sakit yang tersedia tepat waktu dilingkup Tata Usaha			N/A	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
	6. Persentase dokumen operasional pelayanan rumah sakit yang tersedia tepat waktu dilingkup Perencanaan dan Rekam Medis			N/A	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
	7. Persentase pemenuhan SDM sesuai standar rumah sakit			N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	
7	Indikator Sub Kegiatan :											
	1. Jumlah SPM dilingkup Yanmed dan Keperawatan yang tercapai			70	N/A	N/A	N/A	67	N/A	N/A	N/A	
	2. Jumlah SPM dilingkup Tata Usaha yang tercapa			6	N/A	N/A	N/A	6	N/A	N/A	N/A	
	3. Jumlah SPM dilingkup Perencanaan dan Rekam Medis yang tercapai			4	N/A	N/A	N/A	3	N/A	N/A	N/A	

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	4. Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit			N/A	6 dok	57 dok	57 dok	N/A	6 dok	57 dok	57 dok	
8	Indikator Program :											
	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Indikator Kegiatan :											
	Gaji dan tunjangan ASN RSUD Ploso yang dibayarkan tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Indikator Sub Kegiatan :											
	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			115 orang	115 orang	112 orang	112 orang	112 orang	107 orang	112 orang	112 orang	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada tahun 2023, pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) RSUD Ploso masih di bawah target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 85,11%. Hal ini dikarenakan masih banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh RSUD Ploso, mulai dari sarana prasarana, alat kesehatan yang belum memenuhi standar. Ditambah lagi dengan jenis, jumlah, kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan.

Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Ploso Kabupaten Jombang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ploso Kabupaten Jombang, menyatakan bahwa RSUD Ploso Kabupaten Jombang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan. Dalam melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, RSUD Ploso Kabupaten Jombang menyelenggarakan fungsi (1) penyelenggaraan pelayanan medis; (2) penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan nonmedis; (3) penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan; (4) penyelenggaraan pelayanan rujukan; (5) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; (6) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan (7) penyelenggaraan administrasi dan keuangan.

Berdasarkan tugas dan fungsi dari RSUD Ploso Kabupaten Jombang, berikut ini akan dilakukan pemetaan permasalahan.

Tabel 2.3.1
Pemetaan Permasalahan

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mutu pelayanan kesehatan di RSUD Ploso perlu ditingkatkan	Sarana, prasarana dan peralatan yang belum sesuai standar	<p>Terbatasnya anggaran BLUD, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan RSUD Ploso.</p> <p>Pengembangan rumah sakit belum sepenuhnya berdasarkan skala prioritas melainkan menyesuaikan ketersediaan anggaran.</p>
		Keterbatasan SDM, baik	Komposisi SDM di RSUD

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
		jumlah, jenis maupun kualitas	<p>Ploso meliputi 35% ASN dan 65% ASN. Pengajuan usulan kebutuhan ASN (kesehatan) telah dilakukan.</p> <p>Kebutuhan SDM teknis (non kesehatan) tidak dapat diajukan melalui BKPSDM karena tidak ada formasi yang dibuka untuk RS.</p> <p>SOTK RSUD Ploso perlu perubahan dengan pengajuan kenaikan kelas menjadi tipe C. Mengingat saat ini semua urusan rumah sakit hanya diampu oleh 4 (empat) orang struktural.</p>
			Belum semua SDM memiliki kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan kompetensi.
		Penerapan akuntabilitas kinerja ke seluruh unit kerja di RS secara berkelanjutan perlu ditingkatkan	Penerapan AKIP belum memanfaatkan teknologi informasi

Permasalahan yang dihadapi RSUD Ploso dalam menyelenggarakan tugas fungsinya tersebut akan memiliki dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian SPM dan nilai evaluasi AKIP di akhir periode RPJMD tahun 2018-2023. Berikut ini akan ditampilkan keterkaitan antara permasalahan dengan pencapaian visi misi kepala daerah terpilih.

Tabel 2.3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan RSUD Ploso
Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KHD terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<p>Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional</p> <p>Misi 2 : Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius dan berbudaya</p>	Mutu pelayanan kesehatan di RSUD Ploso perlu ditingkatkan	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana, prasarana dan peralatan yang belum sesuai standar - Keterbatasan SDM, baik jumlah, jenis maupun kualitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Sejak tahun 2019 RSUD Ploso sudah menerapkan PPK BLUD. - RSUD Ploso masih memperoleh subsidi anggaran dari Pemerintah Daerah (DBHCHT). - Selain telah berproses mengajukan kebutuhan SDM kepada BKPSDM melalui aplikasi Renbut, RSUD Ploso juga berupaya untuk melakukan rekrutmen BLUD untuk memenuhi jenis SDM yang dibutuhkan segera. Meskipun terdapat tantangan ketersediaan anggaran BLUD yang terbatas.
			<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kunjungan rawat inap belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tahun 2023, penerapan Keputusan Direktur tentang Penetapan Tarif Retribusi Akomodasi Kamar Rawat Inap Kelas dan ICU di RSUD Ploso telah dilaksanakan. Diharapkan dengan adanya penataan kamar kelas, dapat menarik lebih banyak pasien yang harus dirawat inap.

Visi : Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KHD terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			- Belum semua SDM RS memiliki pengetahuan AKIP	- Selalu melibatkan SDM RS di unit layanan dalam penyusunan dokumen AKIP - Saat ini berproses dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam penerapan AKIP (e-SAKIP) - Telah dilaksanakan bimbingan teknis penerapan AKIP di RSUD Ploso

Tantangan yang dihadapi oleh RSUD Ploso Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diantaranya adalah:

1. Peningkatan jumlah rumah sakit swasta di wilayah Kabupaten Jombang, yang akan memiliki kemudahan untuk menarik pasien dan SDM;
2. Aspek hukum yang semakin menuntut kompetensi petugas rumah sakit dan manajemen rumah sakit yang baik;
3. Mekanisme klaim BPJS yang belum tercapai n-1, utamanya untuk klaim BPJS susulan dikarenakan adanya pergantian SIMRS baru;
4. Diberlakukannya kelas rawat inap standar oleh BPJS pada tahun 2025;
5. Tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan berkualitas;
6. Citra rumah sakit kompetitor yang dianggap lebih baik (pelayanan lebih ramah dan lebih cepat);
7. Pembangunan gedung RSUD Ploso sesuai dengan *master plan* dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan rumah sakit;
8. Tuntutan digitalisasi pelayanan kesehatan dengan SDM IT yang minim.

Adapun faktor-faktor yang menjadi peluang bagi RSUD Ploso Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dan DPRD untuk mengembangkan RSUD Ploso Kabupaten Jombang berupa penyediaan anggaran dan pembenahan sistem manajemen RS;
2. Masih tersedianya lahan kosong (tanah aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta tanah *gendom*) untuk pengembangan pelayanan di RSUD Ploso dengan tetap mempertimbangkan ruang terbuka hijau;
3. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan spesialisik dan berbasis teknologi canggih;
4. Kesempatan penambahan dan pengembangan jenis pelayanan spesialisik baru masih terbuka;
5. Peningkatan potensi kasus karena kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan kerja;
6. Berkembangnya sistem pembiayaan kesehatan;
7. Meningkatkan kompetensi RS dengan mengajukan kembali kenaikan kelas menjadi tipe C pada tahun 2023. Saat ini sedang berproses melalui OSS;

8. Wilayah Jombang Utara diproyeksikan menjadi pusat kawasan industri di Jombang pada akhir RPJMD tahun 2018-2023. Sementara RSUD Ploso merupakan satu-satunya rumah sakit milik pemerintah daerah yang berada di wilayah Jombang Utara. Sehingga hal ini menjadi peluang bagi RSUD Ploso untuk menjadi fasyankes rujukan pertama dan utama di wilayah Utara Kabupaten Jombang.

Berdasarkan uraian tantangan dan peluang tersebut, maka dapat dilihat perbandingan antara tantangan dan peluang adalah 8:8. Dengan perbandingan tersebut, diperlukan suatu usaha dan strategi yang tepat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan pencapaian visi dan misi agar tantangan tersebut dapat teratasi sehingga RSUD Ploso Kabupaten Jombang dapat menghasilkan kinerja pelayanan kesehatan yang lebih baik dari periode sebelumnya. Perbaikan kinerja pelayanan dilakukan dengan cara menambah pelayanan baru serta memperbaiki dan mengembangkan pelayanan yang sudah ada.

Berdasarkan kondisi kesehatan masyarakat dan peran serta RSUD Ploso Kabupaten Jombang dalam bidang kesehatan, maka dapat diketahui beberapa pokok hal yang menjadi isu strategis yang perlu diperhatikan oleh RSUD Ploso Kabupaten Jombang, yaitu :

1. Perubahan regulasi yang dinamis terkait jaminan kesehatan;
2. RSUD Ploso merupakan satu-satunya rumah sakit milik pemerintah daerah yang berada di wilayah Jombang Utara. Hal ini merupakan peluang bagi RSUD Ploso untuk menjadi fasyankes rujukan dan terus melakukan pengembangan menjadi RS tipe C, mengingat wilayah Jombang Utara diproyeksikan menjadi pusat kawasan industri di Jombang;
3. Penyesuaian Peraturan Bupati tentang SPM RSUD Ploso;
4. Pemenuhan kelengkapan sarana, prasarana dan alat kedokteran sesuai standar RS tipe C;
5. Pemenuhan dan peningkatan kapasitas SDM sesuai standar RS tipe C;
6. Pengembangan digitalisasi layanan rumah sakit yang terintegrasi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024 adalah meningkatkan daya dukung infrastruktur berkelanjutan yang mendorong industri agribisnis dan pembangunan wilayah. Sementara tema Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 yaitu Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Guna Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agribisnis

dan SDM Unggul dengan prioritas pembangunan Kabupaten Jombang tahun 2024 sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik, keamanan dan ketentraman umum
2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk membangun SDM yang berkarakter berdaya saing dan inovatif serta pengentasan kemiskinan ekstrem
3. Memperkuat infrastruktur berkelanjutan untuk mendukung peningkatan investasi, daya saing dan produk unggulan daerah

Berdasarkan prioritas pembangunan tersebut, maka RSUD Ploso merupakan Perangkat Daerah pengampu utama prioritas 2 yaitu peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk membangun SDM yang berkarakter berdaya saing dan inovatif serta pengentasan kemiskinan ekstrem. Sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Jombang, RSUD Ploso juga merupakan pengampu pendukung prioritas 1, yaitu peningkatan layanan publik, keamanan dan ketentraman umum. Sehingga kebijakan prioritas pembangunan yang dapat diampu oleh RSUD Ploso adalah :

1. Penurunan stunting
2. Penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik

Kebijakan tersebut selaras dengan isu-isu penting internal RSUD Ploso tahun 2024, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

Masih belum memadainya mutu pelayanan di RSUD Ploso dapat dilihat pada indikator SPM yang diukur. Hal ini berdampak juga pada capaian SPM di RSUD Ploso yang masih jauh dari angka ideal. Pada tahun 2023 angka kematian (NDR) mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, meskipun masih tetap di bawah batas maksimal dari angka ideal yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Disamping itu indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan mutu pelayanan. Meskipun IKM RSUD Ploso pada tahun 2023 mendapatkan predikat baik, namun dibutuhkan perbaikan yang berkelanjutan agar dapat menjadi rumah sakit rujukan pertama bagi masyarakat, khususnya Wilayah Kabupaten Jombang Bagian Utara.

2. Pemenuhan kelengkapan sarana, prasarana dan alat kedokteran sesuai standar rumah sakit tipe C

Saat ini Kabupaten Jombang memiliki 2 (dua) rumah sakit milik Pemkab Jombang. RSUD Kabupaten Jombang, rumah sakit tipe B Pendidikan, yang terletak di pusat kota. Sementara RSUD Ploso merupakan satu-

satunya rumah sakit Pemerintah Kabupaten Jombang yang terletak di Wilayah Utara Kabupaten Jombang. Hal ini menjadi peluang dan tantangan bagi RSUD Ploso untuk berbenah dalam meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka mendukung RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2018-2023 yang menetapkan bahwa Wilayah Utara Kabupaten Jombang menjadi pusat kawasan industri. Sehingga diperlukan adanya percepatan pemenuhan kelengkapan sarana, prasarana dan alat kedokteran di RSUD Ploso, mengingat pada tahun 2023 RSUD Ploso akan mengajukan ulang permohonan kenaikan kelas menjadi tipe C. Dengan demikian, masyarakat di Wilayah Utara Kabupaten Jombang dan sekitarnya diharapkan dapat lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap di RSUD Ploso tanpa harus ke pusat kota, yang notabene jaraknya cukup jauh.

3. Pemenuhan dan peningkatan kapasitas SDM sesuai standar RS tipe C
Konsekuensi logis dari peningkatan kelas RSUD Ploso menjadi tipe C adalah pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kapasitas SDM, baik pemberi pelayanan langsung maupun pendukung pelayanan. Komposisi SDM RSUD saat ini terdiri dari tenaga ASN dan Non ASN. Perbandingan keduanya kurang lebih sebesar 30% : 70%. Sehingga dibutuhkan perhatian yang lebih dari pemilik dan BKPSDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM di RSUD Ploso baik jumlah dan jenis. Di samping jumlah dan jenis, juga sangat diperlukan peningkatan kapasitas SDM yang ada sehingga mampu bersaing. Mengingat jenis dan variasi penyakit berkembang begitu cepat, tentunya berbanding lurus dengan perkembangan teknologi kedokteran yang terkait dengan kuratif dan rehabilitatif.
4. Pengembangan digitalisasi layanan yang terintegrasi
Pada era digitalisasi, integrasi data yang berkualitas menjadi suatu komponen penting dalam mewujudkan transformasi digital. Data yang terintegrasi dengan lebih sederhana dalam sistem pelayanan kesehatan merupakan salah satu aspek yang harus terus diwujudkan dan ditingkatkan sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal. Disamping itu juga diharapkan dapat memberikan kemudahan dan mempercepat pelayanan kepada pasien dan pengguna.

Dalam penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh RSUD Ploso pada tahun 2024 dilakukan dengan berdasarkan pada peta proses bisnis RSUD Ploso dengan tujuan:

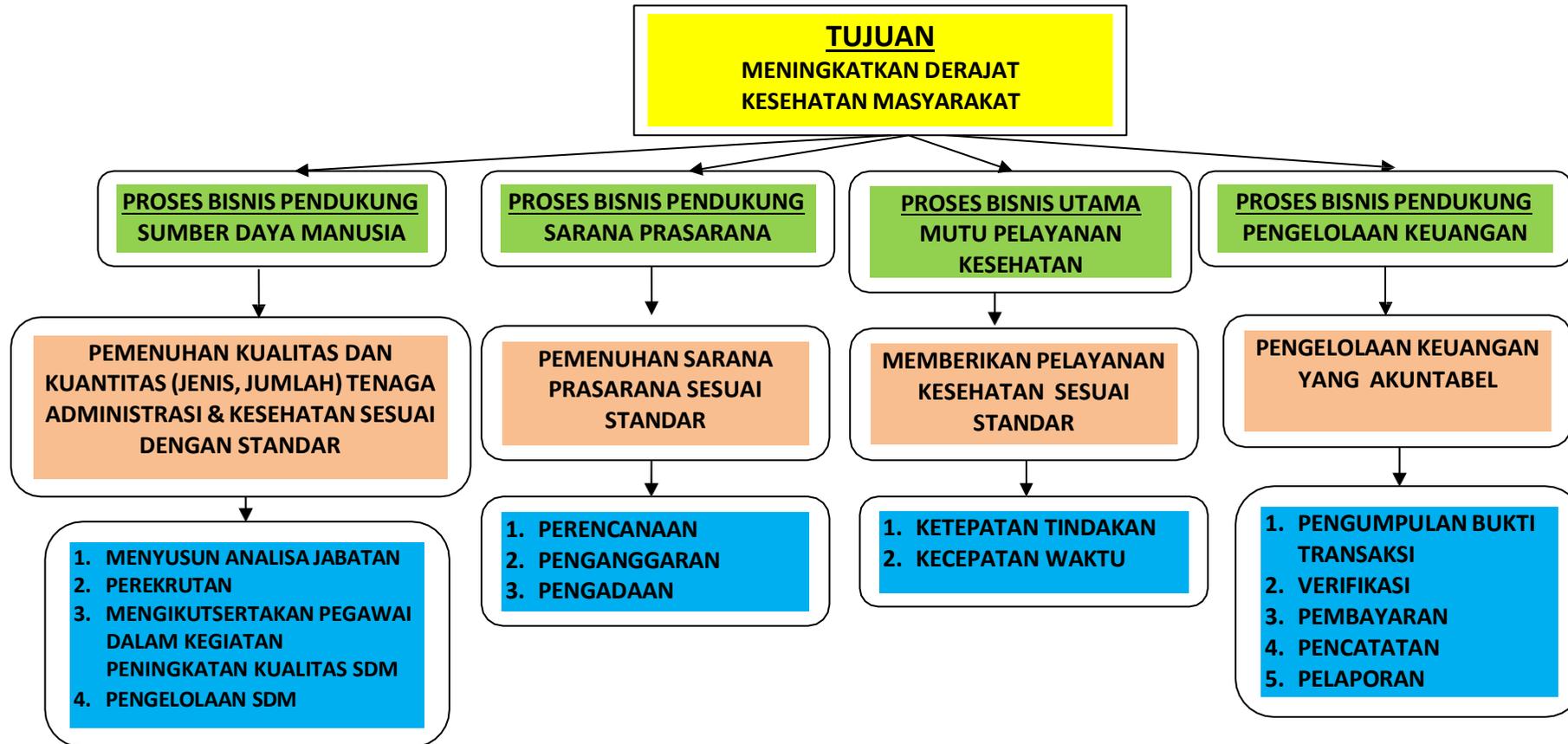
1. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien.
2. Mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang akan dilakukan untuk mencapai visi, misi, tujuan.
3. Memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai peta proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia serta penilaian kinerja.

Selain itu jika penyusunannya didasarkan dengan peta proses bisnis maka kita akan mendapatkan manfaat, diantaranya:

- a. Mudah melihat potensi masalah yang ada dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah.
- b. Memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan. Berikut ini akan ditampilkan gambar peta proses bisnis RSUD Ploso.
- c. Mudah melihat potensi masalah yang ada dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah.
- d. Memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Berikut ini akan ditampilkan gambar peta proses bisnis RSUD Ploso.

GAMBAR 2.4
PETA PROSES BISNIS RSUD PLOSO TAHUN 2024-2026



Berdasarkan peta proses bisnis di atas, maka RSUD Ploso menuangkan dalam program kegiatan. Berikut ini akan dilakukan perbandingan antara rancangan awal rencana kerja RSUD Ploso yang kemudian dijadikan sebagai rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

TABEL 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.58	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD Ploso	1. Persentase capaian pemenuhan sarana prasarana, alat kesehatan dan SDM penunjang layanan rujukan	84%	50.440.457.586,30	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD Ploso	1. Persentase capaian pemenuhan sarana prasarana, alat kesehatan dan SDM penunjang layanan rujukan	84%	48.299.450.636,30	
			2. Persentase capaian SPM RS	82,98%				2. Persentase capaian SPM RS	82,98%		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		1. Nilai ASPAK unsur sarana	93%	9.682.885.200	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		1. Nilai ASPAK unsur sarana	93%	7.541.878.250	
			2. Nilai ASPAK unsur prasarana	86%				2. Nilai ASPAK unsur prasarana	86%		
			3. Nilai ASPAK unsur alat kesehatan	51%				3. Nilai ASPAK unsur alat kesehatan	51%		
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	1 unit	6.318.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	1 unit	6.318.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan	
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
1	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik, Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	3 unit/ set	3.364.885.200	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik, Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	2 unit/ set	1.223.878.250		
	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1. Persentase SPM dilingkup Yanmed dan Keperawatan yang tercapai	85,53%	40.757.572.386,30	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1. Persentase SPM dilingkup Yanmed dan Keperawatan yang tercapai	85,53%	40.757.572.386,30	
				2. Persentase SPM dilingkup Tata Usaha yang tercapai	76,92%				2. Persentase SPM dilingkup Tata Usaha yang tercapai	76,92%		
				3. Persentase SPM dilingkup Perencanaan dan Rekam Medis yang tercapai	60%				3. Persentase SPM dilingkup Perencanaan dan Rekam Medis yang tercapai	60%		
				4. Persentase pemenuhan SDM sesuai standar RS	100%				4. Persentase pemenuhan SDM sesuai standar RS	100%		
Operasional Pelayanan Rumah Sakit			Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	57 dokumen	40.757.572.386,30	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	57 dokumen	40.757.572.386,30		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		Persentase rata-rata capaian kinerja pegawai	100%	8.005.299.116	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		Persentase rata-rata capaian kinerja pegawai	100%	8.070.099.116	
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Gaji dan tunjangan ASN RSUD Ploso yang dibayarkan tepat waktu	100%	8.005.299.116	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Gaji dan tunjangan ASN RSUD Ploso yang dibayarkan tepat waktu	100%	8.005.299.116	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	112 orang	8.005.299.116	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	112 orang	8.005.299.116	
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	108 paket	64.800.000	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah orang yang menerima pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	-	-	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah orang yang menerima pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	108 orang	64.800.000	

Berdasarkan dari tabel di atas dapat dibandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, dari perbandingan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nama program beserta indikator kinerja tidak ada perubahan. Terdapat perbedaan besaran anggaran dikarenakan dua hal, yaitu : a) Hasil rapat koordinasi pengalokasian anggaran DBHCHT tahun 2024 yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, pagu sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit dan sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik, Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyesuaikan dengan persentase pagu bidang kesehatan mendasar pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 sebesar 40% dari total anggaran DBHCHT. Selain itu pagu tersebut harus berbagi dengan OPD bidang kesehatan lain yaitu Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten Jombang, b) Berita Acara Kesepakatan Hasil Rapat Koordinasi Penyampaian Pagu Anggaran RSUD Ploso Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024, yang mencantumkan tambahan belanja mandatory (wajib) berupa seragam olahraga (108 orang x Rp. 600.000,-) sebesar Rp. 64.800.000,-, dimana pada ranwal Renja RSUD Ploso, kegiatan tersebut tidak ada.
2. Nama kegiatan beserta indikator kinerja terdapat penambahan. Nama kegiatan yang ditambahkan adalah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan dengan target 108 orang, yang sebelumnya tidak ada. Perubahan tersebut juga terdapat pada besaran anggaran sebagaimana penjelasan di atas (nomor 1).
3. Nama sub kegiatan beserta indikator kinerja terdapat penambahan. Nama sub kegiatan tersebut adalah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dengan indikator kinerja Jumlah orang yang menerima pakaian dinas beserta atribut kelengkapan dengan target 108 paket. Perubahan tersebut juga terdapat pada besaran anggaran sebagaimana penjelasan di atas (nomor 1).

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai PD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat, maka masukan/ usulan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam mendukung pengembangan RSUD Ploso.

Pada saat acara Forum Perangkat Daerah penyusunan Renja Tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 bulan Februari tahun 2023, RSUD Ploso mengundang *stakeholders*. Dari acara tersebut diperoleh beberapa masukan dan RSUD Ploso berupaya untuk menindaklanjuti beberapa masukan tersebut, diantaranya:

1. *Stakeholders* (Bappeda)

Saat ini Kabupaten Jombang sebagai lokus stunting, salah satu cara untuk penurunan angka kejadian tersebut yaitu dengan intervensi pemberian tablet tambah darah (Fe) dan mendorong masyarakat untuk mengubah pola hidup yang dimilikinya. Inovasi yang telah dibuat oleh RSUD Ploso sangat baik, diharapkan dapat dikelola dan dirawat agar dapat berlanjut dan berkembang.

2. *Stakeholders* (Kecamatan Plandaan)

- Pelayanan loket baik, perlu dipertahankan
- Inovasi pengantaran obat dengan resep dokter diberikan ke farmasi, kemudian obat dapat diantar ke rumah tanpa biaya
- Pegawai IGD berperilaku ramah
- Menjalinkan kerja sama dengan Tim Penggerak PKK untuk sosialisasi pelayanan yang ada di RSUD Ploso, kemudian dapat diberikan *reward*

Tanggapan :

Saat ini RSUD Ploso memiliki beberapa layanan, bagi kelompok ibu-ibu kami memiliki layanan tes kesehatan payudara dengan alat mammografi untuk wanita usia subur.

3. *Stakeholders* (Puskesmas Plandaan)

Waktu rujukan untuk ibu melahirkan dapat dilakukan 10 – 15 menit saja. Puskesmas Plandaan pernah merujuk pasien *emergency*, tetapi kurang mendapatkan respon yang cepat karena terkendala perizinan dari dokter RSUD Ploso.

Tanggapan :

Penerima rujukan seharusnya tidak perlu konsul terlebih dahulu, RSUD Ploso akan memperpendek prosedur agar rujukan dapat diterima secepat mungkin, terutama untuk pasien *emergency*. RSUD Ploso telah membuat nomor khusus bagi pelayanan rujukan dan prosedur telah disusun, terutama mengenai *triase*

dan dokter penanggung jawab. Ada beberapa pelayanan yang memang tidak dapat dilayani oleh RS, karena terhambat kriteria RSUD Ploso yang masih tipe D.

4. *Stakeholders* (Dinas Kesehatan)

Kabupaten Jombang memiliki 15 RS yang terdiri dari 2 RS Pemerintah dan 13 RS Swasta. Akreditasi tidak dapat naik disebabkan oleh beberapa hal, seperti belum adanya Bank Darah. Selain itu, pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten disesuaikan dengan ruangan yang dimiliki, seperti ruang intensif (ICU, PICU, NICU). Aplikasi sistem rujukan RS dari Kementerian Kesehatan, FKTP wajib mengisi sistem rujukan terintegrasi (sisrute).

Tanggapan :

Pelaksanaan akreditasi RSUD Ploso dilakukan di pertengahan tahun 2023. Apakah ada pantauan untuk sistem rujukan, baik penerima maupun pengirim? Mengingat keselamatan pasien jauh lebih utama. Masukan bagi Dinas Kesehatan agar dapat disampaikan ke pusat untuk memperpendek proses yang ada (aplikasi sisrute).

5. *Stakeholders* (DPPKBPPPA)

Apakah tidak dapat diberikan bantuan untuk pelayanan IUD setelah melahirkan bagi RS rujukan? Selain itu, mohon dibantu untuk pelayanan kontrasepsi dengan Metode Operasi Wanita (MOW) yang dirujukan oleh asektor interval yaitu bidan atau FKTP

Tanggapan :

Pembiayaan harus sinergi antarperangkat daerah dan harus mendukung satu sama lain. Beberapa fenomena yang tidak dapat diketahui, SDM meminta jasa pelayanan yang lebih. Untuk selanjutnya, diperlukan penyusunan ulang anggaran atau tarif yang disesuaikan dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas

6. *Stakeholders* (Fatayat Kecamatan Ploso)

Isu yang beredar di masyarakat adalah pemberian pelayanan yang berbeda bagi pasien BPJS dan umum, sehingga masyarakat cenderung tidak menggunakan kartu BPJS agar dapat mendapatkan pelayanan yang lebih

optimal.

Tanggapan :

Pelayanan yang diberikan sama sekali tidak berbeda, kamar rawat inap disesuaikan dengan kelas BPJS. Perbedaan hanya pada prosedur pendaftaran pasien umum dan BPJS, apabila pasien umum hanya perlu membawa KTP. Sedangkan pasien BPJS harus lebih tertib administrasi agar dapat klaim/pergantian biaya perawatan. Selain itu, pasien BPJS juga harus membayar iuran setiap bulan agar tetap aktif kartu BPJS yang dimilikinya

Dengan status RSUD Ploso sebagai BLUD, maka RSUD Ploso tetap berharap untuk mendapatkan subsidi dari APBD, DBHCHT atau DAK guna memenuhi kebutuhan sarana prasarana dan alat kesehatan di RSUD Ploso. Apabila kebutuhan tersebut dapat dipenuhi maka RSUD Ploso berharap dapat mengatasi isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Apabila sarana prasarana dan alat kesehatan dipenuhi maka RSUD Ploso berharap dapat meningkatkan mutu pelayanan pasien, terutama pasien BPJS yang merupakan pelanggan terbesar RSUD Ploso serta pasien umum yang menyasar masyarakat menengah ke atas.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, disebutkan bahwa Perubahan Renstra Kementerian Kesehatan menjadi konsekuensi logis ketika sektor kesehatan akan bertransformasi. Perubahan tersebut mencakup 6 (enam) hal prinsip atau disebut sebagai pilar transformasi kesehatan yang juga merupakan bentuk penerjemahan reformasi sistem kesehatan nasional, yaitu:

1. Transformasi Layanan Primer, mencakup upaya promotif dan preventif yang komprehensif, perluasan jenis antigen, imunisasi, penguatan kapasitas dan perluasan skrining di layanan primer dan peningkatan akses, SDM, obat dan kualitas layanan serta penguatan layanan laboratorium untuk deteksi penyakit atau faktor risiko yang berdampak pada masyarakat;
2. Transformasi Layanan Rujukan, yaitu dengan perbaikan mekanisme rujukan dan peningkatan akses dan mutu layanan rumah sakit, dan layanan laboratorium kesehatan masyarakat;
3. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan dalam menghadapi Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah penyakit/kedaruratan kesehatan masyarakat, melalui kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan, penguatan surveilans yang adekuat berbasis komunitas dan laboratorium, serta penguatan sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan;
4. Transformasi Pembiayaan Kesehatan, untuk menjamin pembiayaan yang selalu tersedia dan transparan, efektif dan efisien, serta berkeadilan;
5. Transformasi SDM Kesehatan, dalam rangka menjamin ketersediaan dan pemerataan jumlah, jenis, dan kapasitas SDM kesehatan; dan
6. Transformasi Teknologi Kesehatan, yang mencakup: (1) integrasi dan pengembangan sistem data kesehatan, (2) integrasi dan pengembangan sistem aplikasi kesehatan, dan (3) pengembangan ekosistem (teknologi kesehatan (regulasi/kebijakan yang mendukung, memberikan kemudahan/fasilitasi, pendampingan, pembinaan serta pengawasan yang memudahkan atau mendukung bagi proses pengembangan dan pemanfaatan teknologi kesehatan yang berkelanjutan) yang disertai peningkatan tatakelola dan kebijakan kesehatan

Seiring dengan pilar transformasi kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan tersebut, maka RSUD Ploso berupaya untuk berbenah agar dapat menjadi bagian dari transformasi layanan rujukan dan teknologi kesehatan. Hal ini sejalan dengan berbagai isu strategis RSUD Ploso, diantaranya penguatan kualitas layanan rumah sakit sesuai dengan standar akreditasi dan pengembangan digitalisasi pelayanan yang terintegrasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Setelah melihat rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dimiliki RSUD Ploso maka berikut ini adalah tujuan dan sasaran RSUD Ploso:

T U J U A N

1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

S A S A R A N

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan RSUD Ploso

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor- Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, diantaranya:

a. Pencapaian Indikator Nasional Mutu (INM)

Untuk mempercepat pencapaian salah satu sasaran strategis RSUD Ploso yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan RSUD Ploso, yang diukur dengan pencapaian INM, maka RSUD Ploso berupaya berbenah pada tataran sumber daya manusia baik perilaku maupun kompetensi. Di samping itu tetap akan diupayakan pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan secara berkelanjutan serta pengembangan digitalisasi pelayanan yang terintegrasi sebagai cara penguatan layanan rujukan.

b. Pencapaian SPM

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan indikator program. Indikator tersebut merupakan turunan dari indikator kinerja utama, pencapaian INM. Strategi yang dilakukan tak jauh berbeda dengan upaya untuk meningkatkan capaian INM. Penguatan layanan rujukan dengan didukung dengan berbagai sumber daya yang ada serta pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan berkelanjutan. Dengan demikian diharapkan capaian SPM yang baik dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.

Berikut ini akan disajikan tabel terkait program/ kegiatan yang akan dilaksanakan oleh RSUD Ploso pada tahun 2024, yang terdiri dari 2 program dan 4 kegiatan dengan 5 sub kegiatan. Dengan rincian 3 kegiatan 4 subkegiatan dibiayai dari APBD dan DBHCHT, 1 kegiatan 1 subkegiatan dibiayai dari BLUD. Jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan 2 program tersebut adalah Rp 56.369.549.752,30. Bila Renja dibandingkan dengan rancangan awal RKPD maka terdapat perbedaan jumlah anggaran dari DBHCHT karena dalam penyusunan Renja telah berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang.

TABEL 3.3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
RSUD PLOSO KABUPATEN JOMBANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun (Tahun 2024)				Catatan	Prakiraan Maju (Tahun 2025)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Persentase capaian pemenuhan sarana prasarana, alat kesehatan dan SDM penunjang layanan rujukan	RSUD PLOSO	84%	48.299.450.636,30			84%	51.122.427.343
						2. Persentase capaian SPM RS		82,98%				87,23%	
1	02	02	2		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	1. Nilai ASPAK unsur sarana		93%	7.541.878.250			94%	9.000.000.000
						2. Nilai ASPAK unsur prasarana		86%				87%	
						3. Nilai ASPAK unsur alat kesehatan		51%				52%	
1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh		1 unit	6.318.000.000	DBHCHT		1 unit	6.000.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun (Tahun 2024)				Catatan	Prakiraan Maju (Tahun 2025)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						rumah sakit							
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik, Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan		2 unit/ set	1.223.878.250	DBHCHT		3 unit/ set	3.000.000.000
1	02	02	2		Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase SPM dilingkup Yanmed dan Keperawatan yang tercapai		85,53%	40.757.572.386,30			88,16%	42.122.427.342,83
				2. Persentase SPM dilingkup Tata Usaha yang tercapai			76,92%				84,62%		
				3. Persentase SPM dilingkup Perencanaan dan Rekam Medis yang tercapai			60,00%				80%		
				4. Persentase pemenuhan SDM sesuai standar RS			100,00%				100%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun (Tahun 2024)				Catatan	Prakiraan Maju (Tahun 2025)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit		57 dokumen	40.757.572.386,30	BLUD		57 dokumen	42.122.427.342,83
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja pegawai		100	7.810.047.918			100	7.810.047.918
					Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan tunjangan ASN RSUD Ploso yang dibayarkan tepat waktu		100	7.810.047.918			100	7.810.047.918
					Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		112	7.810.047.918			112	7.810.047.918
					Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		108 orang	64.800.000			0	0
					Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah orang yang menerima pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		108 orang	64.800.000			0	0

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan RSUD Poso Kabupaten Jombang tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Program ini dicapai dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten Kota. Kegiatan tersebut memiliki 2 sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - b. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota. Kegiatan tersebut memiliki 1 sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Sub Kegiatan Operasional pelayanan RS
 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota. Program ini dicapai dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Kegiatan tersebut memiliki 1 sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Kegiatan tersebut memiliki 1 sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- Program/ kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, target kinerja dan pagu anggarannya yang ada dalam Renja Tahun 2024 ini akan dijadikan sebagai pedoman RSUD Ploso saat menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024. Di dalam RKA nanti akan diuraikan lebih rinci penggunaan dari setiap alokasi anggaran yang ada pada program/ kegiatan.

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja.

Dalam penyusunan Rencana Kerja RSUD Ploso Tahun 2024 yang perlu diperhatikan adalah hasil evaluasi terhadap Rencana Kerja Tahun 2024, karena dari hasil evaluasi tersebut kita akan dapat mengetahui di bagian mana saja yang perlu untuk diperbaiki. Pada program kegiatan yang sudah kita jalankan selama ini tentunya ada sebagian program kegiatan yang kelebihan anggaran dan ada beberapa program kegiatan yang kekurangan anggaran sehingga perlu untuk dilakukan pergeseran anggaran dan dasar untuk melakukan pergeseran anggaran adalah harus menuangkan dulu dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja. Selain itu hal lain yang perlu untuk diperhatikan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah usulan dari unit-unit pelayanan yang sifatnya sangat penting dan mendesak sehingga perlu untuk diakomodir dalam Rencana Kerja Tahun 2024.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah indikator kinerja dan jumlah pagu secara keseluruhan maupun pagu dari masing-masing program kegiatan yang ada di Rencana Kerja Tahun 2024 harus sama dengan yang ada di RKPD Kabupaten Jombang. Selanjutnya indikator kinerja masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan harus selaras. Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang baik.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.

Kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 diantaranya:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- b. Surat Edaran Bupati Jombang Nomor: : 050/10347/415.01/2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024.

5.3 Rencana Tindak Lanjut.

- a. Meningkatkan koordinasi dengan unit pelayanan yang ada di RSUD Ploso untuk mewujudkan perencanaan yang baik dan bersifat responsif.
- b. Meningkatkan kompetensi tenaga perencanaan dengan cara ikut serta dalam acara bimtek atau pelatihan terkait penyusunan dokumen perencanaan.
- c. Meminta dukungan kepada DPRD Kabupaten Jombang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang (TAPD) agar RSUD Ploso dapat diberikan pagu anggaran yang sesuai dengan kebutuhan RSUD Ploso.
- d. Menjadikan hasil evaluasi perencanaan tahun ini untuk bahan membuat perencanaan di tahun yang akan datang dengan memperhatikan kondisi terkini.